



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1904, 2016

KEMENDAGRI. Rencana Kerja. Tahun 2016.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 mengalami perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, terdapat *self blocking* atas anggaran Kementerian Dalam Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun

Anggaran 2016;

- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, perlu dilakukan penyesuaian atas program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
 3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034), terkait dengan penyesuaian atas program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

| LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|--------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|
| PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 | | | | | | | | | | | |
| I. SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | |
| KODE | PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK | | | PAGU (Rp. X 1.000) | | | | | | KET |
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010.01.01 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 1 | Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kemendagri | a. 100% tercapai program prioritas b. LAPKIN Kategori A | a. 100% tercapai program prioritas b. LAPKIN Kategori A | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 2 | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN | WTP | WTP | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 3 | Tingkat Kepuasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik Kemendagri | a. 100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM b. 100% kepuasan terhadap pelayanan komunikasi publik 70% (Kategori B) | a. 100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM b. 100% kepuasan terhadap pelayanan komunikasi publik 70% (Kategori B) | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 4 | Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi | 45% | 45% | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 5 | Penyediaan data dan informasi Kemendagri yang terintegrasi | 60% penyelesaian produk hukum 100% penyelesaian sengketa hukum | 60% penyelesaian produk hukum 100% penyelesaian sengketa hukum | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |
| 6 | Persentase Penyelesaian Produk Hukum dan Sengketa Hukum Kemendagri | 60% penyelesaian produk hukum 100% penyelesaian sengketa hukum | 60% penyelesaian produk hukum 100% penyelesaian sengketa hukum | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| 1214 | PENATAAN PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM | Meningkatnya keselesaan dan harmonisasi peraturan Perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri | Meningkatnya keselesaan dan harmonisasi peraturan Perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri | - | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 7,000,000 | 7,000,000 |
| | 1. Persentase Telaahan Kebijakan yang terfasilitasi | 100% | 100% | - | 1,735,165 | 1,735,165 | 1,735,165 | - | 1,706,129 | 1,706,129 |
| | 2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri | 60 Rancangan Per-UU | 60 Rancangan Per-UU | - | 1,664,017 | 1,664,017 | 1,664,017 | - | 1,467,317 | 1,467,317 |
| | 3. Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum di Lembaga Peradilan dan Bantuan Hukum | 100% | 100% | - | 2,050,604 | 2,050,604 | 2,050,604 | - | 1,902,951 | 1,902,951 |
| | 4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro | 100% | 100% | - | 2,550,214 | 2,550,214 | 2,550,214 | - | 1,923,603 | 1,923,603 |
| 1215 | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA | Meningkatnya kualitas pengelolaan Pegawai di lingkungan Kemendagri | Meningkatnya kualitas pengelolaan Pegawai di lingkungan Kemendagri | 200,000 | 19,800,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 200,000 | 14,300,000 | 14,500,000 |
| | 1. Perencanaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100% | 100% | - | 841,850 | 841,850 | 841,850 | - | 623,975 | 623,975 |
| | 2. Tingkat Kepuasa Pegawai atas Pengelolaan SDM Kemendagri | 100% | 100% | 200,000 | 9,203,220 | 9,403,220 | 9,403,220 | 200,000 | 7,388,213 | 7,588,213 |
| | 3. Jumlah PNS yang mengikuti penilaian kompetensi pegawai | 3.700 Orang | 3.700 Orang | - | 8,570,555 | 8,570,555 | 8,570,555 | - | 5,451,123 | 5,451,123 |
| | 4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Kepegawaian | 100% | 100% | - | 1,184,375 | 1,184,375 | 1,184,375 | - | 836,689 | 836,689 |
| 1216 | PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN REFORMASI BIROKRASI | Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri | Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 1. Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemendagri | 2 Perme ndagri | 2 Perme ndagri | - | 1,790,164 | 1,790,164 | 1,790,164 | - | 1,483,603 | 1,483,603 |
| | | 150 SOP | 150 SOP | | | | | | | |
| | 2. Persentase Penerapan Hasil Analisa Jabatan Kemendagri | 85% Pelaksanaan Hasil Anjab | 85% Pelaksanaan Hasil Anjab | - | 728,134 | 728,134 | 728,134 | - | 513,885 | 513,885 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 3 | Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 70% | | - | 1,294,640 | 1,294,640 | 1,294,640 | - | 933,590 | 933,590 |
| | 4 | Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Organisasi dan Tata Laksana | 100% | | - | 2,187,062 | 2,187,062 | 2,187,062 | - | 2,068,922 | 2,068,922 |
| 1217 | | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | Meningkatnya kualitas dan terimplementasikannya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kemendagri | 100% | - | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | - | 9,380,000 | 9,380,000 |
| | 1 | Persentase Konsistensi Rencana Program dan Anggaran Kemendagri | 100% | | - | 7,850,000 | 7,850,000 | 7,850,000 | - | 5,729,303 | 5,729,303 |
| | 2 | Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kemendagri | 100% | LAPKIN kategori A | - | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | - | 2,800,697 | 2,800,697 |
| | 3 | Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Perencanaan | 100% | | - | 850,000 | 850,000 | 850,000 | - | 850,000 | 850,000 |
| 1218 | | PENGLOLAAN KETATAUSAHAAN, RUMAH TANGGA, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN | Meningkatnya Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan, Keamanan, serta Sarana dan Prasarana Perkantoran sesuai kebutuhan | 86% | 65,290,185 | 33,035,068 | 98,325,253 | 33,035,068 | 58,790,185 | 25,035,068 | 83,825,253 |
| | 1 | Persentase Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keamanan sesuai Kebutuhan | 100% | | - | 9,112,213 | 9,112,213 | 9,112,213 | - | 7,850,533 | 7,850,533 |
| | 2 | Persentase Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kemendagri | 100% | | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 2,542,050 | 2,542,050 |
| | 3 | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan | 100% | | - | 20,922,855 | 20,922,855 | 20,922,855 | - | 14,642,485 | 14,642,485 |
| | 4 | Persentase Penyelesaian Pelayanan Operasional Kerja (operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) lingkup Setjen yang tepat waktu | 100% | | 65,290,185 | - | 65,290,185 | 65,290,185 | 58,790,185 | - | 58,790,185 |

| 1219 | PENATAAN FASILITASI KERJASAMA | Meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri | Meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri | - | 6,500,000 | 6,500,000 | - | 4,800,000 | 4,800,000 |
|------|---|--|--|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|
| 1 | Persentase Fasilitasi Penataan Kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan Dalam dan Luar Negeri | 100% | 100% | - | 4,350,000 | 4,350,000 | - | 3,022,072 | 3,022,072 |
| 2 | Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Fasilitasi Kerja Sama | 100% | 100% | - | 2,150,000 | 2,150,000 | - | 1,777,928 | 1,777,928 |
| 1220 | PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kemendagri | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kemendagri | ##### | 12,000,000 | ##### | ##### | 10,000,000 | ##### |
| 1 | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kemendagri | WTP | WTP | - | 5,086,795 | 5,086,795 | - | 4,257,375 | 4,257,375 |
| 2 | Persentase Surat Permintaan Penyelesaian terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemendagri yang dapat di proses | 100% | 100% | - | 943,450 | 943,450 | - | 649,590 | 649,590 |
| 3 | Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan lingkup Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan tepat waktu | 100% | 100% | - | 2,857,377 | 2,857,377 | - | 2,442,762 | 2,442,762 |
| 4 | Persentase Penyelesaian Kerugian Negara dan Perbendaharaan Lingkup Kemendagri | 100% | 100% | - | 2,068,568 | 2,068,568 | - | 1,679,493 | 1,679,493 |
| 5 | Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu | 100% | 100% | ##### | - | ##### | ##### | - | ##### |
| 6 | Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Keuangan dan Aset | 100% | 100% | - | 1,043,810 | 1,043,810 | - | 970,780 | 970,780 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1221 | PENGLOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kemendagri | 7,680,000 | 26,037,324 | 33,717,324 | 7,331,000 | 17,806,324 | 25,137,324 |
| | 1 Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Kemendagri | 11 Dokumen Kebijakan | - | 2,403,095 | 2,403,095 | - | 1,535,679 | 1,535,679 |
| | 2 Pemanfaatan Data dan Informasi Pokok Kemendagri | 40 data informasi/pokok | - | 2,663,540 | 2,663,540 | - | 1,365,654 | 1,365,654 |
| | 3 Pengelolaan Sistem Informasi Lingkup Kemendagri | 10 aplikasi | - | 2,334,230 | 2,334,230 | - | 1,861,876 | 1,861,876 |
| | 4 Operasionalisasi Infrastruktur TIK lingkup Kemendagri | 85% Infrastruktur TIK | 7,680,000 | 6,362,075 | 14,042,075 | 7,331,000 | 1,199,155 | 8,530,155 |
| | 5 Pelaksanaan Rakor regulars via teleconference Pusat dan Daerah | 100% | - | 12,274,384 | 12,274,384 | - | 11,843,960 | 11,843,960 |
| 1222 | PENGLOLAAN ADMINISTRASI PIMPINAN | Meningkatnya pengelolaan administrasi pimpinan dalam rangka penyediaan materi dan kebijakan, tata usaha serta keprotokolan | 3,000,000 | 11,300,000 | 14,300,000 | 3,000,000 | 9,800,000 | 12,800,000 |
| | 1 Tingkat Ketepatan Waktu Operasional Ketatausahaan Pimpinan | 100% | 3,000,000 | 2,130,325 | 5,130,325 | 3,000,000 | 2,105,225 | 5,105,225 |
| | 2 Persentase Terlaksananya Koordinasi Pimpinan dan Penyelenggaraan Keprotokolan | 100% | - | 8,315,710 | 8,315,710 | - | 6,858,810 | 6,858,810 |
| | 3 Persentase Penyediaan Materi Rapat, Materi Persidangan dan Materi Kebijakan Kemendagri | 100% | - | 853,965 | 853,965 | - | 835,965 | 835,965 |
| 1223 | PENGLOLAAN KEHUMASAN | Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyerbaluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian | 100,000 | 10,100,000 | 10,200,000 | 100,000 | 8,100,000 | 8,200,000 |
| | 1 Persentase Fasilitasi dan Pelayanan Hubungan Masyarakat | 100% | - | 5,205,703 | 5,205,703 | - | 4,164,562 | 4,164,562 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 2 | Persentase Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi | 100% | 100% | - | 2,217,920 | 2,217,920 | 2,217,920 | - | 1,774,366 | 1,774,366 |
| 3 | Persentase Pelayanan Perpustakaan Kemendagri | 100% | 100% | 100,000 | 1,272,130 | 1,372,130 | 1,372,130 | 100,000 | 997,694 | 1,097,694 |
| 4 | Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Penerangan | 100% | 100% | - | 1,404,247 | 1,404,247 | 1,404,247 | - | 1,163,378 | 1,163,378 |